**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

* 1. **Kajian Pustaka**
     1. **Ekonomi Pembangunan**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

* Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

* Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

* Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

* + 1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Dalam hal ini maka ekonomi makro memiliki sasaran diantaranya adalah :

1. Tingkat kesempatan kerja (tingkat *Employment*) yang tinggi
2. Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi
3. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi
4. Keadaan perekonomian yang stabil
5. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang
6. Distribusi pendapatan yang lebih merata
7. Tingkat inflasi yang rendah
8. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Setiap negara menginginkan perekonomian dalam negaranya berada pada keadaan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tidak hanya peningkatan pendapatan nasional saja tetapi seluruh perekonomiannya. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya peningkatan pendapatan nasional yang mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 3 hal penting yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan output secara berkesinambungan.
2. Dasar keberlangsungan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan merupakan perkembangan teknologi.
3. Diperlukan adanya penyesuaian sikap, kelembagaan dan ideologi agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik dengan ”pembangunan” (*development*).

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

* + 1. **Definisi Pembangunan Manusia**

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation Development Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembanguan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari [harapan hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup), [melek huruf](https://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf), [pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan) dan [standar hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup) untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah [negara maju](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju), [negara berkembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang) atau [negara terbelakang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang) dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam perencanaan pembangunan. Karena hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran.

IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Saat perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: pertama, paradigma pertumbuhan (*Growth paradigm*); kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigm kesejahteraan (*Welfare paradigm*); dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat ada manusia (*people centered development paradigm*).

Pendapat Owens (1987) yang dikutip oleh Martinus Nanang: hal terpenting adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan benda (*the development of people rather than the development of things*), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih daripada pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik). Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihanpilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”).*

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | Metode Lama | | Metode Baru | |
| UNDP | BPS | UNDP | BPS |
| Kesehatan | Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) |
| Pengetahuan | Angka Melek Huruf (AMH) | Angka Melek Huruf (AMH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Harapan Lama Sekolah (HLS) |
|  | Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) | Rata-rata Lama sekolah (RLS) | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| Standar Hidup Layak | PDB per kapita (PPP US$) | Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp) | PNB per kapita (PPPUS$) | Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp) |
| Agregasi | Rata-rata Aritmatik  IPM= (Ikesehatan+Ipendidikan+Ipengeluaran)×100 | | Rata-rata Geometrik  IPM= 3√Ikesehatan+Ipendidikan+Ipengeluaran × 100 | |

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

* + 1. **Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita**

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara (Untoro, 2010: 13). Pendapatan perkapita menunjukan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variable yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk nasional bruto dan jumlah penduduk. Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

Pendapatan per kapita = Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk

Menurut Rakiman (2011: 80) Pendapatan Perkapita suatu negara merupaka tolak ukur kemajuan dari negara tersebut , apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di negara tersebut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan , tapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat / diperoleh dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja , banyak faktor yang mempengaruhi penurunan / peningkatan pendapatan tersebut seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu negara akan mengalami penurunan . Hal ini berlaku bagi seluruh negara di belahan dunia tidak terkecuali di negara Indonesia.

* + - 1. **Manfaat Perhitungan Pendapatan Perkapita**

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan per kapita dihitung secara berkala , biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain sebagai berikut (Alam, 2007: 50) :

1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
2. Sebagai data perbandingan tingkat kesehjateraan suatu negara dengan negara lain.
3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.
   * 1. **Ketimpangan Distribusi Pendapatan** 
        1. **Pengertian Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu: distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Insentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.
   * + 1. **Teknik Perhitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan koefisien Gini dan Ukuran Bank Dunia dan satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah, yaitu dengan Indeks Williamson.

1. **Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincolin Arsyad,1997).



**Gambar 2.1**

**Kurva Lorenz**

1. **Indeks Gini Rasio**

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

Keterangan:

G = Gini Ratio

Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

* GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
* 0.4 ≤ GR ≤ 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
* GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

1. **Ukuran Bank Dunia**

Bank Dunia yang bekerjasama dengan Institute of Development Studies menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa:

1. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi.
2. Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
3. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah, (Mudjarat Kuncoro, 2003).
4. **Indeks Williamson**

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk di suatu negara.

Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Yi = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi

fi = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi

Besarnya Indeks Williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah

tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti

semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Ketimpangan Tinggi jika IW > 0,5

- Ketimpangan Sedang jika IW = 0,35 – 0,5

- Ketimpangan Rendah jika IW < 0,35.

Namun demikian Indeks Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

* + 1. **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah sudah dianggap tidak sesuai dengan adanya perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan, terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memiliki asas desentralisasi fiskal yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan senbagian wewenang yang tadinya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Artinya, dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau yang sudah didesentralisasikan pusat ke daerah.

* + - 1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut UUD No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). Menurut Halim dan Nasir (2006:44) Pengertian APBD adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah” dan Menurut Halim (2007 : 25) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

* + - 1. **Landasan hukum penyusunan APBD antara lain sebagai berikut:**
* Undang-undang No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah daerah
* Undang-undang No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
* Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD.
* PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
  + - 1. **Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal
2. Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.
3. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
4. Menciptakan perioritas belanja atau keutaman belanja pemerintahan daerah.
5. Menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakila Rakyat (DPRD)
   * + 1. **Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Fungsi APBD terbagi atas 5 fungsi yakni fungsi otoritasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi. lihat pembahasannya seperti dibawah ini:

* + 1. Fungsi Otoritasi

Fungsi otoritasi adalah sebagai pedomen untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.

* + 1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan, berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

* + 1. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah

* + 1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, berfungsi sebagai dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi/efektivitas ekonomi .

1. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, berfungsi dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

* + - 1. **Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

1. Dasar hukum PAD

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam :

1) UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah

2) UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah

3) UU No.34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) PP No.65/2000 tentang Pajak Daerah

5) PP No.66/2000 tentang Retribusi Daerah

6) Permendagri No.59/2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Komposisi PAD

Komposisi pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi, Laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Di antara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

* 1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

* 1. Retribusi

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagai dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan.

* 1. Laba perusahaan daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

* 1. Pendapatan lain-lain yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang dialokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Pinjaman Daerah

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen ( 1% ) dari APBD, itu pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri.

1. **Belanja Daerah**

Menurut permendagri 13 thn 2006, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Jenis-jenis belanja :

1. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

1. Belanja tidak langsung

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiyaan mencakup :

* + 1. SiLPA tahun anggaran sebelumnnya
    2. Pencairan dana cadangan
    3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    4. Penerimaan pinjaman, dan
    5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiyaan mencakup :

1. Pemebentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman
   * 1. **Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232). Dan (Tangkilisan 2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian euangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untk meningkatkan penerimaan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007: 232) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 2.2**

**Pola Hubungan kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kemampuan Keuangan Daerah | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
| Rendah Sekali | 0-25 | Instruktif |
| Rendah | >25-50 | Konsultatif |
| Sedang | >50-75 | Partisipatif |
| Tinggi | >75-100 | Delegatif |

*Sumber : Halim, 2007*

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007 :169) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan atara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.
   1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.3**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Peneliti | Judul | Metode Analisis | Hasil Empiris |
| 1 | Firda Rizky Amalia, Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2014) | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Aloasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dan regresi linier berganda.  Dengan analasis persamaan :  Y = α +β1X1 + β2X2 + e  Dimana :  Y = Indeks Pembangunan Manusia periode 2008-2012  X1 = Kemandirian Keuangan Daerah periode 2008-2012  X2 = Keserasian Alokasi Belanja periode 2008-2012  α = Konstanta  β1,β2 = Koefisien Regresi  e = Kesalahan pengganggu. | Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rata-rata sebesar 24,38 persen, sedangkan rata-rata alokasi dana untuk belanja publik sebesar 41,43 persen. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM, Secara parsial, kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifkan terhadap IPM. |
| 2 | Putu Ayu Krisna Dewi, I Ketut Sutrisna (2014) | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio keuangan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda.  Dengan analisis persamaan :  Y = α + β1X1 + β2X2 + μ  Dimana :  Y = Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012.  X1 = Rasio kemandirian keuangan daerah 2008-2012  X2 = pertumbuhan ekonomi periode 2008-2012  α = Konstanta  β1,β2, = Koefisien Regresi  μ = Kesalahan Pengganggu | Hasil analisis menunjukkan secara simultan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM, secara parsial kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. |
| 3 | Achmad Nurur Rofiqi (2013) | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011 | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis metode regresi data panel (poooled data) yaitu gabungan antara data time series dan cross section, dan dianalisis menggunakan pendekatan FEM ( fixed effect model).  Dengan persamaan model :  IPM = β0 +β1X1 + β2X2 + e  Dimana :  GRW = Pertumbuhan Ekonomi  KKD = Kemampuan Keuangan Daerah  KMD = Kemandirian Daerah  α1-α2 = Koefisien regresi  α0 = Konstanta  ei = Variabel pengganggu | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indes pembangunan manusia (IPM) di seluruh kabupaten pulau madura. Sementara variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di seluruh Kabupaten Pulau Madura. |
| 4 | Devyanti Patta (2012) | Analisis Faktor-faktor yang Mmepengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001 – 2010 | Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis Linier Berganda. Dengan persamaan model :  Y = Ln β0 + β1X1 + β2X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5X5 + µ  Dimana :  Y = Indeks pembangunan manusia (persen)  β0 = Intercept  X1 = Pertumbuhan ekonomi (persen)  X2 = Persentase penduduk miskin (persen)  X3 = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (milyar)  X4 = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (milyar)  X5 = Ketimpangan distribusi pendapatan (persen)  β1,β2,β3,β4,β5= Koefisien regresi  µ = Terms of error | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, variabel persentasi pendudu miskin berpengaruh negatif dan signifikan, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, variabel pengeleuaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dan variabel ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain dari pada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (sukirno 2006:430).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Achmad Nurur rofiqi 2013), PDRB perkapita atau pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu oleh (Utomo,2011) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pekerja dan PDRB perkapita serta PAD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/Kota Jawa Timur Periode 2002-2008”, menunjukan bahwa PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM).

Menurut permendagri 13 thn 2006, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari Belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam alokasi belanja publik, pemberian pelayanan umum seperti insfrastuktur untuk pendidikan dan kesehatan karena dengan masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik sudah menjadi suatu dasar pembangunana manusia. Menurut (Tukiran, 2010) menyatakan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda sehinga dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu keberhasilan dalam pembangunan manusia di suatu daerah tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astri, 2013) menyatakan dalam hal pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik dapat terpenuhi melalui alokasi belanja pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi belanja pemerintah di sektor tersebut maka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2012) dimana pengeluaran pemerintah/ belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

penelitian yang dilakukan oleh surya dewi (2014) secara parsial merupakan elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap belanja daerah. Secara spesifik hal ini merupakan indikasi bahwa pada kondisi cateris paribus, bila Gini ratio turun sebesar 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 1 persen. Ketimpangan pendapatan akan semakin mengecil sebagai efek simultan dari kenaikan belanja daerah yang secara bersama-sama akan meningkatkan IPM .

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232). Artinya bisa dikatakan suatu daerah mandiri dalam mengelola keuangannya untuk membiayai daearahnya sendiri tanpa bergantung pada pihak eksternal atau pemerintah pusat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pambudi, 2008) yang menunjukan bahwa tingkat kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi berarti bahwa daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, (Firda, 2013).

Dengan dedukasi teori serta landasan-landasan normatif yang relevan serta induksi dari berbagai penelitian sejenis, secara garis besar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam skema di bawah ini:

Pendapatan Perkapita

Untoro (2010)

Gini Rasio

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Permendagri (2006)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2007)

(halim

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

* 1. **Hipotesis Penelitian**

1. Diduga Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Diduga Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Diduga Gini rasio berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Diduga Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Diduga Pendapatan perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, dini rasio dan Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.